

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerah nya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam pembiayaan.

Menurut Abdul Halim (2015:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber di daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan daerah memegang peranan penting, karena sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan dan pembangunan suatu daerah.

Adapun fenomena terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretaris daerah kota sukabumi mengatakan Hampir 18 persen turunnya. Transfer dari pusat turun dan PAD turun, sehingga perlu menyesuaikan lagi pengeluaran-pengeluarannya, proyeksi pendapatan APBD Kota Sukabumi tahun 2020, dari Rp 1.417.740.624.638 diproyeksikan menurun menjadi Rp 1.156.738.973.839. Tidak beroperasinya

sejumlah objek pajak seperti hotel dan restoran menyumbang turunnya pendapatan asli daerah.

Cara mensiasatinya kita amankan dulu untuk belanja-belanja prioritas, termasuk yang prioritas itu penanganan Covid-19 dan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan menurun berdampak pada daerah untuk melakukan peningkatan PAD kota sukabumi melakukan pengawasan dengan operasi instansi serta untuk membuat pendapatan yang daerah yang teru meningkat (Dida ,2020).

Sekretaris kesbangpol kota sukabumi mengatakan dana alokasi khusus dari pemerintah mengalami sedikit kendala seperti dana yang di salurkan selalu tidak sesuai tanggal dan bulan, sedangkan dana alokasi khusus diutamakan untuk pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang utama.

Cara untuk mengatasi masalah harus memanfaatkan PAD yang ada di daerah tersebut agar kota sukabumi tidak bergantung pada pemerintah pusat. Tidak ada DAK cukup menyulitkan daerah terutama sarana dan prasarana (Dian Kusnaedi, 2021).

Wali kota sukabumi mengatakan Anggaran Pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) perubahan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan. Termasuk dari Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunannya itu berkisar di angkat 14.49 persen (Achmad Fahmi, 2020)

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

68 sekolah dari tingkat TK sampai SMP di Kota Sukabumi pada tahun 2021 akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan total dana DAK yang akan disalurkan kepada 68 sekolah tersebut mencapai Rp. 26 Milyar. DAK tersebut ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah (Achmad Fahmi ,2021).

Pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana tersebut berwujudkan dana perimbangan yaitu terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang telah dijelaskan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang asalnya dari APBN, yang dialokasikan khusus untuk daerah yang kebutuhan khusus (Sumiyati, 2015:56). Dana Alokaai Khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap anggaran pendapatan pembelanjaan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai

wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Sekretaris kota sukabumi nota pengantar raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Pjs Raden Gani Muhamad mengatakan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, secara umum mengalami dinamika yang cukup fluktuatif dan harus dicermati dengan seksama.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah melakukan beberapa langkah seperti mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui perkiraan terukur secara rasional dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah dan penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (Raden Gani, 2021).

Menurut Adisasmita (2015:34) APBD merupakan suatu rancangan program keuangan daerah menggambarkan pendapatan dan penerimaan di lain juga merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran suatu program dan pendanaan pembangunan dalam setiap tahunnya. APBD juga adalah instrument yang menciptakan disiplin dalam suatu proses, dan pengambilan keputusan terkait dengan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah inti sumber yang dapat membiayai suatu daerah dan sumber pendapatan di daerah dalam menciptakan pembangunan daerah (Ardhani,2015:106). Maka dari itu pemerintah mengharapkan agar daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil-hasil dari pendapatan dengan maksimal mungkin untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi semakin baik PAD di daerah maka semakin besar pula APBD.

Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan peraturan untuk pembangunan daerah pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi

bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas serta mengingat pentingnya pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi khusus (DAK) sebagai sarana untuk menciptakan keberhasilan suatu daerah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul. ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kota Sukabumi”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya PAD yang di gunakan untuk DAK.
2. Terjadinya penurunan APBD disebabkan PAD yang terus menurun.
3. Efek dari APBD yang terus menurun DAK semakin mengecil sehingga tiap daerah harus memaksimalkan dana yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Seberapa besar pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian untuk menemukan jawaban masalah penelitian dengan cara kita menarik suatu kesimpulan didasarkan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui setelah itu kita mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan Uma Sekaran (2017:68).

1.5.1 Kegunaan Praktis

Berdasarkan teori tersebut maka kegunaan praktis yang penulis ambil yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah (fenomena) yang diangkat dalam penelitian ini, baik bersifat umum ataupun khusus yang berlaku di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis merupakan kegunaan penelitian dari aspek teoritis yakni manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu (Soekidjo, 2010:13). Oleh karena itu penelitian dasar penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti

Peneliti menghasilkan hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri.

2) Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.